

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada fakultas syariah dan hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANISA

NIM: 10300112006

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya, serta memberikan kenikmatan lahir batin kepada penulis sehingga masih tetap berada di Jalan-Nya dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar”. Shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad saw. teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang telah menanamkan model pendidikan yang terbaik bagi umat Islam untuk membentuk generasi penerus yang berakhlak mulia.

Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak halangan dan rintangan hingga kesulitan serta hambatan yang penulis alami, namun berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Yatim dan Ibunda Suriyati yang tanpa rasa lelah sedikitpun mendidiku, menasehatiku dan do’a tulus yang selalu terucap di setiap sujudnya. Serta dukungan yang tiada henti dalam menyertai setiap langkah perjuangan dalam menjalani jenjang pendidikan hingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus pembimbing skripsi I penulis, serta Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibunda Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku ketua jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta Ibunda Dr. Kurniati M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
5. Ibunda St. Nurjannah, SH.,MH selaku pembimbing II skripsi penulis.
6. Segenap dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum.

7. Kakakku tercinta Syamsiar Rani yang selama ini menjadi motivasi terbesar dalam hidupku yang sudah mengajari arti sebuah perjuangan.
8. Kedua adikku, Arman Jaya dan Muhammad Nawir serta nenekku yang terkasih yang selama ini menghibur dan menyemangati penulis selama penulisan skripsi.
9. Teman-teman kelasku, Rahmi, Lelly, Ertina, Fitriani, Puthé, Imma, Uchi, Thyka, Husnah, Ummul, Vina, Nuge, Uni, Kiki, Mifta, Agus, Sadli, Haris, Kherun, Muhdar, Ansar, Yunus, Gope, Asmir, Rafli, Nuzul, Alif, Andri, Nawir, Amman, Rusyaid, Aswan, Sofyan, Arisal, Jihad, dan Irfan, yang telah banyak menemani mengarungi bahtera kehidupan kampus baik dalam suka maupun duka. *Berjuanglah, mimpi tidak diraih begitu saja!*
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2012 baik dari jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan maupun jurusan lain di Fakultas Syariah dan Hukum. Tak terkecuali rekan-rekan mahasiswa UIN Alauddin Makassar khususnya Fakultas Syariah dan Hukum serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan hati lapang dan terbuka mengharap tegur sapa dan kritik demi terbangunnya hasil penulisan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca serta dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum di kemudian hari.

Samata-Gowa, Maret 2016

ANISA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITESARI	ix
ABSTTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13-52
A. Pengertian Anak	13
B. Tindak Pidana Narkotika	19
1. Pengertain Tindak Pidana	19
2. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenisnya	20
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	26
C. Pengaturan Sanksi Bagi Anak yang Menyalahgunakan Narkotika	31
1. Sanksi Bagi Anak dalam Perundang-undangan Indonesia	31
2. Sanksi Bagi Anak dalam Perundang-undangan di beberapa Negara di luar Indonesia	40
D. Narkotika Menurut Pandangan Hukum Islam.....	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53-58
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	53
1. Jenis Penelitian	53
2. Lokasi Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data	54
D. Populasi dan Sampel	55
E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Instrumen Penelitian	56
G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	56
H. Pengujian Keabsahan Data	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 59-79
A. Faktor-faktor Penyebab Anak Menyalahgunakan Narkotika...	59
B. Dampak yang Ditimbulkan dari Penyalahgunaan Narkotika...	68
C. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak	73
 BAB V PENUTUP	 80-84
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi	82
 KEPUSTAKAAN	 85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	x	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yaa’</i>	Ai	a dani
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	A dan garis di atas
إ	Kasrah dan yaa'	I	I dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	U dan garis di atas

Contoh:

مَات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa'marbuutah* ada dua, yaitu *taa'marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجِّنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَم : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِيْنَاللهِ *diinullah* بِاللهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt = *subhanallahu wata'ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wasallam*

a.s	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut :

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= الى اخرها / الى اخره
ج	= جزء

ABSTRAK

Nama : Anisa

Nim : 10300112006

Judul : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Makassar ? Dari pokok masalah tersebut diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu 1) Faktor apakah yang menjadi penyebab seorang anak menyalahgunakan narkotika ?, 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?, dan 3) Bagaimana peranan penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Yuridis Formal. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah polisi, Hakim dan anak yang menyalahgunakan narkotika. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (*interview*), Observasi (pengamatan), dan Dokumen atau bahan pustaka. Kemudian tehnik pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: Identifikasi data, Reduksi data, Koding data, dan Editing data. Dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna narkotika dikalangan anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor paling mendasar yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika adalah: faktor keluarga, faktor lingkungan/sosial, faktor ekonomi dan faktor hukum. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, yaitu: 1) Dampak secara langsung seperti untuk fisik dirasakan ketenangan sementara untuk kehidupan anak yaitu kehilangan kasih sayang dari orang tua, dikucilkan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, di jauhi teman, dikeluarkan dari sekolah dan dimasukkan ke dalam penjara. 2) Dampak secara tidak langsung yaitu akan mengalami gangguan pada organ tubuh, terkena HIV, dan akan sulit mendapatkan pekerjaan. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu: 1) usaha preventif (pencegahan), seperti melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai seluk beluk narkotika, melakukan kampanye anti narkoba, dan melakukan secara

rutin operasi antik (anti narkoba). 2) usaha represif (penindakan) yaitu dengan memberikan tindakan tegas kepada anak yang tertangkap basah menyalahgunakan narkoba.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus menjadi cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya *Die Seele Des Kindes* (jiwa

anak) pada tahun 1882, kemudian disusun oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak.¹

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan precursor narkotika.²

Meskipun narkotika sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, apabila dalam penggunaannya ternyata disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.³ Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.⁴

¹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 5.

²Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 1.

³Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 5.

⁴Santi Sanita, *Bahaya Nafza Narkoba* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008), h. 2.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵ Yaitu *Narkotika Golongan I*, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja. *Narkotika Golongan II*, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker). *Narkotika Golongan III*, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah *kodein*(berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk menahan rasa nyeri dan peredam batuk.⁶

Mengenai narkotika, zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, juga termasuk zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3) tentang Narkotika.”

⁶Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), h.7.

manusia. Adapun dasar hukum diharamkannya narkoba yaitu dalam QS Al-A'raf/7:

157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya :

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁷

Dalam ayat di atas sangat jelas bahwa segala macam yang buruk itu diharamkan oleh Allah swt. dan jika dikaitkan dengan masalah narkoba, maka tidak ada satu jenis pun narkoba yang tidak menimbulkan atau menghilangkan akal sehat manusia. Bahkan narkoba lebih memabukkan dari miras karena itu penyalahgunaan narkoba hukumnya haram layaknya miras.

Kuantitas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, semakin hari semakin meningkat, baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai

⁷Kementerian Agama Rerpublik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 170.

yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah dan sosial. Hal ini disebabkan karena semakin pudarnya *social order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum yang dipandang sebagai salah satu saran *social engineering* dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial yang sedang terjadi.⁸

Saat ini kejahatan narkoba yang biasanya dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan suatu bangsa dan Negara, sehingga harus ada upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas narkoba yang dilakukan secara bersama-sama. Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu sendiri dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah yang besar bagi suatu Negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Dewasa ini, menurut hasil pengamatan yang ada bahwa pihak konsumen pecandu narkoba rata-rata adalah anak dimana didominasi oleh anak usia sekolah. Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah kuatnya pengaruh pergaulan teman sebaya, demikian juga pergaulan anak sekarang ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekadar mendapat pengakuan status

⁸Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, h. 11.

⁹Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, h. 27.

sosial dari kelompok muda mudi lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan.

Melihat berbagai kenyataan hidup dan berkembang mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak maka penyusun tertarik dalam meneliti agar bisa mengetahui permasalahan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di kota Makassar.

B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

1. Deskripsi Fokus

Dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yang dianggap penting:

a. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut,¹⁰

b. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.¹¹

¹⁰Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 41.

¹¹Republik Indonesia, “Undang-undang Narkotika (UU RI No.22 Tahun 1997) dan Psikotropika (UU RI No. 5 Tahun 1997).”

c. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.¹²

d. Anak

Tidak ada keseragaman mengenai definisi anak dalam berbagai ketentuan hukum. Oleh karena itu pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih prospek dalam menetapkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak, yaitu:¹³

1) Konvensi hak-hak anak tahun 1989

Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

¹²Republik Indonesia, “Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Tentang Narkotika.”

¹³Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 39-43.

2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 bagian 5 berbunyi: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 50 ayat (1) berbunyi “anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.¹⁴

4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (92) secara jelas dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹⁵

2. Fokus Penelitian

Judul skripsi ini membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dan sejauh mana penerapan hukum tentang tindak pidana tersebut.

¹⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka pokok permasalahannya yaitu bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sehingga diperoleh sub masalah antara lain sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab seorang anak menyalahgunakan narkotika ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?
3. Bagaimana peranan penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?

D. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengindentifikasikan kemungkinan signifikansi dan konstribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.¹⁶

Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁶UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Pers, 2013), h.13.

1. Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky dalam bukunya ***Tindak Pidana Narkotika***. Dalam buku ini membahas tentang bentuk tindak pidana narkotika dimana bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal ada tiga yaitu penyalahgunaan/melebihi dosis, pengedaran narkotika dan jual jual beli narkotika. Selain itu juga membahas tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana narkotika dimana penyelesaian perkara-perkara narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tersebut, yakni dalam pasal 64 Sedangkan mekanisme dari penyelesaian suatu perkara narkotika harus diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam KUHAP.
2. Dr. Siswantoro Sunarso, S.H., M.H. dalam bukunya ***Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum***, membahas tentang metode penegakan hukum yang komprehensif dengan melakukan kajian terhadap peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat sebagai fundamental yang kokoh dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan psikotropika.
3. Y. Bambang Mulyono dalam bukunya ***Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya***, membahas tentang faktor paling mendasar yang menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan *kortsluiting* yaitu perbuatan yang merugikan dan membahayakan diri maupun lingkungan.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini , yaitu :

- a. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menjadi penyebab seorang anak menyalahgunakan narkotika.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Untuk mengetahui bagaimana peranan penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan anak tetapi juga kalangan dewasa.

Dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis narkotika, dampak negative yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika serta sanksi bagi pengguna narkotika itu sendiri. Karena masih banyak kalangan masyarakat, terkhusus mahasiswa yang belum bisa memahami bagaimana sebenarnya dampak yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis pembahasan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk

kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Anak

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak.¹

1. Pengertian anak secara sosiologis

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu member hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu pendapatnya didengar dan

¹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1.

diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.²

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, batasan-batasan tentang seorang anak atau belum dewasa tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh) baik bagi anak pria maupun bagi anak wanita anak.³

2. Pengertian anak secara psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan cirri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase yang perkembangan yang dialami seorang anak yaitu masa kanak-kanak terbagi dalam masa bayi, masa kanak-kanak pertama (antara usia 2-5 tahun), masa kanak-kanak terakhir (antara usia 5-12 tahun), dan masa remaja (antara usia 13-20 tahun).

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12

²Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 2.

³Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam*. h. 44.

tahun. Namun, karena dikenal adanya masa remaja, masa setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja. Atas dasar hal tersebut, seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun.⁴

3. Pengertian anak secara yuridis

Tidak ada keseragaman mengenai definisi anak dalam berbagai ketentuan hukum. Oleh karena itu pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rule") Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih prospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak, yaitu:⁵

⁴Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 3-4.

⁵Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 39-40.

a. Konvensi hak-hak anak tahun 1989

“for the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier” (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).⁶

Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut Konvensi Hak Anak ini yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun pasal ini juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundang-Undangan nasional dari tiap-tiap Negara peserta yang menandatangani konvensi ini.

b. KUHPerdara (Pasal 330)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 secara tersirat menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada

⁶United Nations Childrens Fund, “Convention on The Rights Of The Child, Resolusi PBB No. 44/25”, dalam Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 5.

dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.⁷

Untuk menghilangkan keraguan yang timbul tentang apa yang dimaksud dengan anak di bawah umur, pemerintah mencabut ordonasi 21 Desember 1917 L.N 1917-738 an menentukan sebagai berikut: Apabila peraturan Undang-undang memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenal bangsa Indonesia dengan istilah itu, yang dimaksudkan ialah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak menikah lebih dahulu. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 21 tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah *belum dewasa*. Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 47 ayat (1) berbunyi: “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”. Pasal 50 ayat (1) berbunyi “anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.⁸

Dari Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang ini ditentukan batas belum dewasa (anak) bagi pria (Sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun akan

⁷Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , Pasal 330.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 6 ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1).

tetapi apabila ingin melangsungkan pernikahan apabila belum mencapai dari orang tua.⁹

- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu berbunyi “warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.¹⁰

Ketentuan diatas tentang persyaratan ikut memilih dalam pemilihan umum ditetapkan 17 tahun. Dalam usia 17 tahun ini, sistem hukum Indonesia melihat bahwa mereka sudah matang dan dewasa dalam berfikir serta dalam mempertanggung jawabkan keputusan menyangkut politik kenegaraan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan mereka akan menentukan hak-hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga Negara Indonesia. Dewasa dari segi ketatanegaraan, adalah apabila seseorang berusia 17 tahun. Ini berarti 17 tahun ke bawah dianggap belum dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹¹

⁹Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 42.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 47.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah “*stafbaarfeit*” atau “*delict*” dalam bahasa Belanda. Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun dalam undang-undang yang pengertiannya sama dengan “*stafbaarfeit*”. Istilah tersebut antara lain : perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1976 memakai istilah tindak pidana.¹² Dengan demikian pengertian sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

Tindak pidana, dapat berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU RI No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU RI No. 19 Tahun 2002), UU RI No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU RI No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU RI No.31 Tahun 1999) dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴ Jadi, tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-

¹²Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 37-38.

¹³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 37.

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67.

undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.¹⁵

2. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenisnya

a. Pengertian Narkotika

Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.¹⁶ Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.¹⁷

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narcois*” yang berarti “*narkose*” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau

¹⁵Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 41.

¹⁶Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 1.

¹⁷Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 99.

timbulnya khayalan-khayalan.¹⁸ Sementara kata narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *narcotics* yang berarti obat bius. Secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (*anestetik*) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (*analgetik*). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (*anestetika*) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.²⁰

Pengertian umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 121.

¹⁹Abdul Majid, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika," dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, h. 118.

²⁰Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika."

narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²¹

b. Jenis-jenis Narkotika

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 menentukan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam beberapa golongan.²²

1. *Narkotika Golongan I*, adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja.
2. *Narkotika Golongan II*, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker).
3. *Narkotika Golongan III*, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah *kodein*(berbentuk serbuk

²¹Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan)”, *Laporan Penelitian* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 27.

²²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, h. 122.

putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.²³

Adapun jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:

a. Opiat atau Opium (Candu)

Opium merupakan zat adiktif yang di dapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.²⁴ Opium berupa candu kasar atau mentah didapat dari getah buah tanaman *Papaver somniterum* yang disadap/digores dan dibiarkan mongering. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkannya dari pemakaian opium pada pemakai yaitu menimbulkan rasa gelisah (*rushing sensation*), menimbulkan semangat, membuat waktu terasa berjalan lambat, merasa pusing, kehilangan keseimbangan dan mabuk serta menimbulkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.²⁵

b. Morfin

Kata “morfin” berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada system saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan dan

²³Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkotika* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), h. 9-10.

²⁴Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 12.

²⁵Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkotika* (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), h. 7.

berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara Intra Cutan (di bawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke dalam pembuluh darah).²⁶ Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian morfin yaitu; menimbulkan euphoria (rasa senang berlebihan), merasa mual, merasa bingung (konfusi), merasa gelisah dan perubahan suasana hati serta mulut terasa kering dan warna muka berubah.²⁷

c. Heroin atau Putaw

Heroin atau Putau merupakan golongan narkotoika semisintesis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya heroin digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian heroin yaitu; timbul rasa gelisah, jantung berdesar kencang, timbul warna kemerahan dan gatal di sekitar hidung, tidak suka bersosialisasi (menyendiri) dan penyimpangan perilaku seperti mencuri, berbohong dan menipu.

d. Ganja atau Kanabis

Ganja atau Kanabis berasal dari tanaman *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Semua bagian dari tanaman mengandung *kanabioid psikoaktif*. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rook yang disebut joints. Ganja bersifat mengikat pikiran dan dapat membuat penggunanya merasa ketagihan.

Ganja mengandung sejenis bahan kimia yang disebut delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Bahan kimia ini dapat mempengaruhi suasana hati

²⁶Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, h. 13.

²⁷Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba*, h. 8.

manusia serta mempengaruhi cara orang tersebut melihat dan mendengar hal-hal disekitarnya. Ganja juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan seseorang. Jika menggunakan ganja, pikiran akan menjadi lamban dan kecerdasanpun menurun.²⁸

e. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan karena efek vasokonstriksinya juga membantu.²⁹

Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (hidroklorida) dan bentuk basah (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Kokain sering juga disebut dengan koka, coke, happy dust, snow, Charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.³⁰

²⁸Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba*, h. 10.

²⁹Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan kesehatan dan Hukum*, h. 17.

³⁰Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Impelementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 125.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Dari Bab-bab Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana adalah:³¹

a. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi

Karena potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka khusus narkotika golongan I diatur tersendiri dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

Penggunaan narkotika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya:

- o Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;

³¹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 172.

- o Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I.³²

b. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat (Pasal 1 angka 2). Yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkoba (Pasal 1 angka 10).

Untuk memproduksi narkotika dibuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obat dalam hal-hal tertentu. Dalam rangka pengawasan terhadap proses produksi, Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri. Pengertian pengendalian tersendiri adalah pengendalian yang dilakukan secara terpisah dengan pengendalian yang lain, yakni dikaitkan dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika, baik kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalam wujud obat sebagai hasil akhir proses produksi (Pasal 8 ayat (21)).³³

³²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, h. 174.

³³Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, h. 175-176.

c. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan (Pasal 10). Pengertian lembaga ilmu pengetahuan tersebut termasuk juga instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

d. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor

1) Surat persetujuan ekspor dan persetujuan impor

Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 3), sedangkan pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari daerah pabean (Pasal 1 angka 4).

Di dalam pelaksanaan impor dan ekspor narkotika tunduk pada UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan peraturan lain yang berlaku. Untuk melakukan impor dan ekspor, Menteri Kesehatan hanya member izin kepada satu pedagang besar farmasi milik Negara yang telah mempunyai izin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam keadaan tertentu menteri Kesehatan dapat member izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik Negara seperti yang dimaksud di atas (Pasal 12 dan 15). Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.

Pelaksanaan impor (Pasal 14) dan ekspor (Pasal 17) dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengimpor atau pengekspor, dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengimpor dan pengekspor. Impor dan ekspor narkotika hanya dapat dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri (Pasal 18).

Apabila tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan mengimpor dan mengekspor narkotika diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82.³⁴

2) Pengangkutan

Pengangkutan narkotika diatur dalam pasal 20 sampai pasal 25 yang meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara modal atau sarana pengangkutan apapun (Pasal 1 angka 8).

Eksportir narkotika wajib memberikan dokumen dan surat persetujuan kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor, wajib memberikan dokumen dan surat persetujuan tersebut kepada penanggung jawab pengangkut, sedangkan penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen dan surat persetujuan tersebut (Pasal 23).

³⁴Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, h. 178.

3) Transito

Pengertian transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa nerganti sarana angkutan (Pasal 1 angka 11). Pada dasarnya transito narkotika dilarang mengubah arah Negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan Negara tujuan , maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan. Untuk itu selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah pejabat bead an cukai.³⁵

Setiap perubahan Negara tujuan ekspor narkotika dalam hal transito narkotika tersebut, hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari: *petama*, pemerintah Negara pengekspor narkotika. *Kedua*, pemerintah Negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika dan *ketiga*, pemerintah Negara tujuan perubahan ekspornarkotika (Pasal 27).

Apabila terjadi kerusakan terjadi terhadap kemasan, pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat bead an cukai (Pasal 28).

Ancaman terhadap transito narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas diatur dalam pasal 81 ayat (1).

³⁵Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*, h. 181.

e. Tindak Pidana narkoba yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran.

Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32). Peredaran narkoba tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai Pasal 38) atau penyerahan (Pasal 39 sampai Pasal 40). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpahak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba (Pasal 1 angka 5).

Narkoba dalam bentuk obat jadi dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada departemen kesehatan. Terhadap narkoba golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis, dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan (Pasal 33 ayat (1) dan (21)).³⁶

C. Pengaturan Sanksi Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkoba

1. Sanksi Bagi Anak Dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Artinya, Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur pidana sekaligus tindakan secara bersama-sama, sehingga hakim dapat memilih apakah menjatuhkan pidana atau tindakan. Meskipun demikian, baik dalam Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak.³⁷

³⁶Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika*, h. 182-183.

³⁷Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015), h. 83.

a. Ketentuan sanksi bagi anak dalam KUHP

Secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Artinya, penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi si anak. Penggunaan sanksi pidana bagi anak tidak dapat disamakan dengan penggunaan sanksi pidana bagi orang dewasa. Oleh karenanya juga sangat ironis dan tidak dapat dibenarkan apabila ada anak yang menjalani pidana bersamaan dengan orang dewasa.³⁸

Di dalam praktek, seringkali terjadi anak menjalani pidana bersama dengan orang dewasa atas alasan tidak adanya sel khusus untuk anak atau karena ditempat itu tidak tersedia LP Anak. Praktek penempatan secara bersama antara anak dengan orang dewasa juga sering terjadi selama proses peradilan, misalnya pada tingkat penyidikan di kepolisian dimana tahanan anak seringkali dicampur dengan tahanan orang dewasa atas alasan tidak ada sel khusus untuk anak atau atas alasan terbatasnya ruangan sel.

Secara umum di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu:

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490,

³⁸Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Cet. II; Malang: Setara Press, 2015), h. 11.

492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah³⁹

Pasal 46

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hokum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah, atau dengan cara lain dalam kedua hal di atas paling lama sampai orang yang bersalah berusia delapan belas tahun

Pasal 47

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.⁴⁰

Tiga pasal di atas, yaitu Pasal 45 dimana mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya,⁴¹ Pasal 46 mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan

³⁹Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bab III, pasal 45.

⁴⁰Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bab III, Pasal 47.

⁴¹Made Sadhi Astuti, "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," dalam Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 11.

apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan Pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.⁴²

Sejak diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Anak ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan “pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Berdasarkan deskripsi singkat tentang tiga pasal dalam KUHP tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa stelsel sanksi terhadap anak yang ada di dalam KUHP pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kemungkinan putusan tanpa pidana, sekalipun kesalahan pelaku terbukti. Peluang ini diberikan oleh ketentuan Pasal 45 KUHP. Dengan demikian, ketentuan Pasal 45 KUHP hakikatnya telah memberikan landasan yuridis yang sangat kuat, berkenaan dengan kemungkinan adanya putusan tanpa pidana. Jalan pikiran pembuat KUHP berkaitan dengan ketentuan Pasal 45 KUHP pada dasarnya mudah dimengerti mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang semestinya memperoleh perlindungan hukum secara baik. Oleh karenanya ketentuan Pasal 45 KUHP tersebut memberikan alternative yang cukup kepada hakim untuk sedapat mungkin menghindarkan anak dari putusan pidana.⁴³

⁴²Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 12.

⁴³Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 12.

- b. Adanya keterlibatan lembaga atau pihak swasta dalam pelaksanaan putusan. Kemungkinan ini diberikan oleh ketentuan Pasal 46 KUHP. Formulasi Pasal 46 KUHP ini pada dasarnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk dilibatkan dalam pelaksanaan putusan hakim, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan tanpa pemidanaan. Keterlibatan pihak atau lembaga swasta di dalam pelaksanaan agar sedapat mungkin hakim menghindarkan anak dari putusan yang berupa pidana. Sebab, dengan putusan yang demikian Negara dapat melibatkan masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelembagaan dalam melaksanakan putusan hakim. Pasal 46 KUHP ini memberikan tiga kemungkinan yaitu diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam rumah pendidikan Negara, diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam lembaga atau yayasan swasta, atau diserahkan kepada pemerintah untuk dilakukan pemeliharaan dalam keluarga atau perorangan. Dengan demikian pelaksanaan putusan hakim sangat memberi peluang untuk melibatkan masyarakat, sehingga lebih menegaskan bahwa tanggungjawab pemeliharaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi dapat dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong antara pemerintah dengan lembaga atau yayasan swasta dan atau warga masyarakat.
- c. Adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada pelaku anak, khususnya yang berupa pidana mati dan pidana seumur hidup. Larangan ini ditentukan dalam pasal 47 KUHP.⁴⁴

⁴⁴Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 13.

b. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak, namun dalam implementasinya belum terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru; untuk itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap dibanding Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang pidana dan tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah secara tegas dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Disamping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasa 70, yang menyebutkan “ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Untuk jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dan tindakan-tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-83.

c. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Narkotika.

Untuk melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila dicermati, terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak, yaitu bagi mereka yang belum cukup umur.

Namun demikian, oleh karena Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya

stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sesuai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*.⁴⁵

Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 85, yang menyatakan:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

1. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
3. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila dicermati, maka stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika diatas hanya menggunakan satu formulasi, yaitu stelsel sanksi yang bersifat tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika hanya menggunakan satu system perumusan, yaitu system perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat kaku (imperatif). Dengan sistem perumusan ancaman seperti ini, maka tidak ada pilihan lain bagi hakim. Jadi, hakim hanya dihadapkan apda satu jenis sanksi pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa. Hakim tidak dapat memilih alternatif pidana lain selian pidana penjara.

Dengan formulasi seperti itu, persoalannya adalah bagaimana apabila yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika

⁴⁵Koeno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 23.

adalah orang yang belum cukup umur ? Dengan merujuk ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa meskipun dalam pasal 85 Undang-Undang Narkotika pidana yang harus dijatuhkan hakim hanyalah pidana penjara, namun apabila orang yang melakukan pelanggaran tersebut kualifikasinya masih belum cukup umur, maka berlakulah ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.⁴⁶

⁴⁶Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 24.

2. Sanksi bagi Anak dalam perUndang-Undangan di beberapa Negara di luar Indonesia

a. Belanda

Di Belanda ketentuan-ketentuan khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda. Bab baru ini dimasukkan kedalam WvS Nederland pada tahun 1961.⁴⁷

Dalam KUHP Belanda, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah ke dalam Undang-Undang pada tanggal 7 juli 1994 (*stb.* Tahun 1994 No. 528). Pada Pasal 77h diatur tentang bentuk-bentuk pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.⁴⁸ Pidana dan tindakan tersebut adalah;

1) Pidana Pokok (Pasal 77h ayat 1), terdiri atas:

a) Dalam hal kejahatan

Anak dijatuhi pidana penjara atau denda. Lama pidana penjara yang diancamkan terhadap anak yang berusia 12 sampai 16 tahun adalah 1 hari sampai dengan 12 bulan; terhadap usia diatas 16 tahun diancam pidana penjara antara 1 hari sampai dengan 24 bulan. Pidana denda yang diancamkan berkisar antara 5 gulden sampai 5000 gulden. Sebagai sanksi pengganti hakim dapat menjatuhkan satu sanksi alternatif, yaitu:

(1) Melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa upah (kerja sosial) untuk kepentingan umum sampai maksimum 200 jam, yang dikerjakan dalam jangka waktu 1 tahun. Jika putusan pengadilan memerintahkan kerja social dalam jangka waktu yang tidak melebihi dari 100 jam, maka pelaksanaannya dalam waktu 6 bulan.

⁴⁷Barda Nawawi Arief, "Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana", dalam Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 53.

⁴⁸Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h. 75.

- (2) Melakukan perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan, dalam jangka waktu maksimum 200 jam, dan dikerjakan dalam 1 tahun. Jika pengadilan menjatuhkan sanksi yang tidak melebihi 100 jam, maka perbaikan tersebut dilaksanakan paling lama 6 bulan.
- (3) Mengikuti proyek pendidikan, dengan jangka waktu maksimum 200 jam, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan.

b) Dalam tindak pidana yang tergolong dalam pelanggaran, denda yang dapat dijatuhkan antara 5 gulden sampai dengan 500 gulden.

2) Pidana Tambahan (Pasal 77h ayat 3)

Pidana yang dijatuhkan yaitu penyitaan dan pencabutan hak untuk mengemudi kendaraan (Surat Izin Mengemudi).⁴⁹ Hakim dapat menjatuhkan setelah minta pendapat kepada Badan Pembina dan Perlindungan Anak (Pasal 77n).⁵⁰

3) Tindakan (Pasal 77h ayat (4))

- (a) Ditempatkan pada lembaga untuk anak selama 2 tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun, di dalam hal khusus dapat diperpanjang 2 kali.
- (b) Tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor.
- (c) Perampasan keuntungan yang diperoleh karena perbuatan melawan hukum
- (d) Ganti kerugian⁵¹

⁴⁹Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h. 76.

⁵⁰Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 61.

⁵¹J.J.M. Van Dijk, "Actuele Criminologie", Diterjemahkan oleh Soemitro dalam Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h. 76.

b. Yunani

Di Yunani, bentuk pidana yang diancamkan terhadap anak dan remaja diatur dalam Bab VIII, Bagian Umum KUHP (*Penal Code*). Pelaku pelanggaran yang berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dipidana dengan dijatuhi “tindakan reformatif” (Pasal 122); “tindakan pe-rawatan” (Pasal 123); dan anak yang berusia 13 tahun atau lebih dapat dikenakan penahanan dalam panti asuhan (*confinement in a reformation* (pasal 127)). Usia minimum anak yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana paling rendah 13 tahun.

Berdasarkan KUHP Yunani, tindakan-tindakan reformatif yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- 1) Teguran keras atau cercaan (reprimand) bagi remaja atau anak-anak;
- 2) Penempatan remaja atau anak dibawah pengawasan orang tua atau walinya;
- 3) Penempatan remaja atau anak pada perwakilan pe-ngawasan atau yayasan perlindungan anak, lembaga per-lindungan, atau suatu panitian khusus yang dibentuk untuk pengawasan remaja;
- 4) Penempatan remaja di Negara bagian atau kota praja atau lingkungan masyarakat yang tepat, atau dilembaga pendidikan privat.⁵²

Tindakan perawatan dapat diperintahkan atas nasehat spesialis medis, di mana remaja memerlukan perhatian khusus, khususnya karena menderita gangguan kejiwaan, buta, bisu-tuli, epilepsy dan sebagainya.

Untuk anak berusia 7-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan reformatif atau tindakan perawatan. Untuk yang berusia 13-17 tahun pengadilan hanya boleh

⁵²Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h. 77.

memerintahkan tindakan reformatif atau tindakan perawatan, atau apabila dipandang perlu, penahanan dalam panti asuhan.⁵³

Bentuk tindakan non-institusional merupakan tulang punggung (the backbone) dari penyelenggaraan peradilan anak di Yunani.

Dari jenis tindakan reformatif, sanksi teguran tegas atau cercaan yang paling sering dikenakan. Jumlah tindakan institusional, sangat sedikit dijatuhkan.⁵⁴

c. Yugoslavia

Di Yugoslavia, pidana terhadap anak diatur dalam pasal 64 samapi dengan pasal 79L KUHP. Dalam KUHP tersebut dibedakan antara pengertian anak, anak junior, dan anak senior. Anak (child) berusia dibawah 14 tahun (Pasal 65 ayat (1)), anak junior berusia antatra 14 tahun sampai 16 tahun (Pasal 66 ayat (1)), dan anak senior berusia antara 16 tahun sampai dengan 18 tahun (Pasal 66 ayat (2)).

Selanjutnya dalam KUHP Yugoslavia daiatur sebagai berikut:

- 1) Anak yang pada saat melakukan delik masih berusia dibawah 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana maupun tindakan pendidikan (edukatif). Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1), anak tersebut akan ditangani oelh badan perwalian sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Anak yang pada saat melakukan tindak pidana telah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai usia 16 tahun tidak dapat dipidana, tetapi hanya dapat dikenakan tindakan edukatif (Pasal 66 ayat (1)).
- 3) Dalam Pasal 66 ayat (1), diiatur bahwa seorang anak yang pada saat melakukan delik berusia 16 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dapat

⁵³Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 65.

⁵⁴Barda Nawawi Arief, “Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana”, dalam Koeno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 65.

dikenakan tindakan edukatif sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP, dapat juga dijatuhkan dipana, tetapi piana yang dijatuhkan hanya pidana khusus untuk anak, yaitu berupa pidana penjara anak.

- 4) Dalam Pasal 66 ayat (3), diatur bahwa tindakan keamanan dapat dijatuhkan terhadap anak junior dan anak senior. Tindakan keamanan dan pidana penjara anak tidak akan membawa akibat hukum seperti tersebut pada Pasal 37A ayat (1) sub 5 dan 7.⁵⁵

Menurut Pasal 68, tujuan tindakan-tindakan edukatif (*Educative Measures*), yaitu untuk melindungi pendidikan, perbaikan dan pengembangan para pelaku anak memperluas perlindungan, bantuan dan pengawasan kepada mereka dan juga untuk mencegah mereka melakukan tindak pidana. Jenis-jenisnya menurut Pasal 69, yaitu:

- a) Tindakan disiplin (*Disciplinary measures*):
 - (1) Teguran keras/pencercaan;
 - (2) Dimasukkan ke Pusat Pendisiplinan/Penertiban Anak.
- b) Tindakan pengawasan intensif (*measures of intensified supervision*)
 - (1) Pengawasan orang tua/wali;
 - (2) Pengawasan dalam keluarga lain atau badan-badan perwalian.
- c) Tindakan institusional (*institutional measures*)
 - (1) Penempatan di lembaga pendidikan;
 - (2) Penempatan pada panti asuhan pendidikan-korektif;
 - (3) Penempatan pada panti asuhan anak cacat.⁵⁶

⁵⁵Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, h. 78.

⁵⁶Koeno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 63.

D. Narkotika Menurut Pandangan Hukum Islam

Al-Qur'an dan hadits merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kaum muslim. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama serta hadits sebagai sumber kedua mengandung pokok-pokok ajaran serta petunjuk yang harus dipahami secara sistematis disertai upaya konkrit dalam rangka member pemahaman yang baik dan benar sehingga syariat yang dikandung tidak bergeser dari tujuan yang dikehendaki.⁵⁷

Syariat Islam bernilai universal dan merupakan rahmat Allah bagi semesta alam. Kehidupan manusia selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kemampuannya meningkatkan realisasi fungsinya sebagai khalifah di bumi. Rahmat Allah yang berwujud agama Islam yang telah disempurnakan, yang diwahyukan kepada Nabi terakhir Muhammad saw. memberikan pedoman hidup yang bersifat menyeluruh, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah kemasyarakatan. Ajaran agama islam juga berisi hal-hal yang diwajibkan dan yang dilarang. Bahkan Islam menggariskan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk.

Para ulama sepakat bahwa ajaran Islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (harga diri). Lima hal ini dalam usul fiqh merupakan kebutuhan yang bersifat primer disebut tingkat daruriy dalam maqasid al-tasyri'. Dalam pembahasan tentang tujuan pemberian hukum Islam ini, para ulama sepakat bahwa hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat

⁵⁷Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 195.

manusia. kerananya, mereka sepakat bahwa hukum yang ditetapkan Allah ada tujuannya, dan tujuan itu adalah kemaslahatan umat.⁵⁸

Pandangan Islam tentang narkoba dilandasi oleh keinginan mewujudkan kemaslahatan untuk manusia, mengingat dampak dan bahaya yang diakibatkan oleh narkoba. Memang, dalam al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan ecstasy, putauw dan shabu-shabu secara eksplisit. Begitu juga status hukum mengenai hal tersebut. Namun, dalam kasus narkoba erat sekali kaitannya dengan pemeliharaan akal sehat. Siapaun tahu, narkoba bisa mengakibatkan seseorang kehilangan akal sehatnya dan merusak organ tubuhnya. Akal adalah unsur terpenting bagi manusia setelah jiwanya. Sebab tanpa akal, manusia akan jatuh ke derajat yang sama dengan hewan.

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak pernah disebutkan haramnya narkoba dan minuman keras lainnya selain khamar. Di dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang membahas secara spesifik mengenai narkoba. Hanya saja, narkoba digolongkan sejenis minuman memabukkan. Zat ini (narkoba) digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. hal ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.⁵⁹

Shalih Bin Ghanim Sadlan mengungkapkan bahwa yang dimaksud narkoba dalam istilah bahasa arab disebut *mukhaddirat*. Maksudnya menunjukkan kepada

⁵⁸Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 196-197.

⁵⁹Al-Ahmady Abu An-Nuur, "Narkoba", dalam Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 20.

sesuatu yang terselubung, kegelapan dan kelemahan.⁶⁰ Oleh karena itu dilihat dari bahasa dapat disimpulkan bahwa narkoba identik dengan kelemahan dan kelesuhan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana halnya pengaruh minuman khamar.⁶¹

Khamar adalah minuman memabukkan. *Khamar* menurut bahasa arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal. Khamar itu terbuat dari macam-macam benda, seperti anggur, korma, beras, gandum dan sebagainya.⁶²

Seorang tokoh fiqh jinayah mengemukakan bahwa ulama berbeda pandangan dalam memahami substansi khamr. Menurut Imam Malik, Al-Syafi’I, dan Ahmad; meminum atau memakan sesuatu yang memabukkan, baik yang diberi nama khamr maupun tidak, baik bahan bakunya dari anggur maupun beras, atau baik unsure memabukkannya banyak maupun sedikit, tetap saja haram.⁶³

Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah, yang diharamkan hanya jenis minuman yang bernama khamr, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Menurutnya ada tiga hal yang termasuk dalam kategori khamr, yaitu sebagai berikut:

- a. Air anggur yang telah mendidih dan mengeluarkan buih. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, air anggur ketika telah mendidih sudah menjadi khamr, walaupun tidak mengeluarkan buih.

⁶⁰Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, “Bahaya Narkoba Mengancam Umat”, dalam Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 20.

⁶¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 80.

⁶²Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih* (cet. Ke-2; Jakarta: 1998), h. 537.

⁶³Abdul Qadir Audah, “Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i,” dalam M Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Azmah, 2013), h. 56.

- b. Air anggur yang telah direbus dan yang tersisa kurang dari 2/3 telah berubah menjadi khamr, baik basah maupun kering.
- c. Perasan kedelai ketika telah mendidih dan mengeluarkan buih. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, perasan itu telah menjadi khamr meskipun belum mengeluarkan buih.⁶⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minuman atau makanan selain tiga hal di atas, seperti gandum, jagung atau beras, baik diperas maupun dimasak; semuanya tidak termasuk khamr. Meminumnya atau memakannya tetap hal, kecuali setelah diminum mengakibatkan mabuk.

Islam melarang khamar (minuman keras), karena dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, akal, jiwa, kesehatan dan harta. Dari sejak semula, islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/1: 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah: “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” dan

⁶⁴M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 56-57.

mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “yang lebih dari keperluan,”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu supaya kamu berfikir.”⁶⁵

Dari ayat di atas menyatakan bahwa larangan untuk meminum khamar, karena dengan meminum khamr sama sekali tidak ada manfaatnya bahkan sekalipun ada maka dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya itu.

Prinsip tentang larangan khamr ini dipegang teguh oleh Negara-negara islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad ke-20, Negara-negara islam mulai berorientasi ke barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah khamr (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak diancam dengan hukuman, kecuali apabila ia mabuk di muka umum.⁶⁶

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman untuk peminum minuman keras (khamr) adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi’I dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi, mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim (imam) memandang perlu. Dengan demikian, menurut pendapat imam Syafi’I, hukuman hadnya empat puluh kali dera, sedangkan kelebihanannya yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman ta’zir.

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nash yang qath’i yang mengatur tentang hukuman had bagi peminun khamr ini

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 34.

⁶⁶Ahmad Warid Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 71.

tidak ada. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman had bagi peminum khamr, sebagaimana dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun Al-Qur'an mengharamkan khamr, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun untuk hukumnya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum khamr dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Abu Bakar juga demikian, pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum khamr. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman had yang paling ringan (rendah) adalah delapan puluh kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian di kirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman had untuk peminum khamr itu delapan puluh kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* juga merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syara'. Akan tetapi, mereka yang berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum khamr itu empat puluh kali dera beralasan dengan sunah, yang menjilid peminum khamr dengan empat puluh kali dera, yang kemudian diikuti juga oleh Khalifah Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi saw. itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan *ijma'* tidak boleh terdiri atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan empat puluh kali dera dari Sayidina Umar itu merupakan hukuman ta'zir

yang boleh diterapkan apabila imam (hakim) memandang perlu.⁶⁷ Masalah ta'zir ini sepenuhnya menjadi kompetensi penguasa setempat. Jika ingin, maka dapat dilakuka; tapi jika tidak ingin, dapat ditinggalkan. Hal ini tergantung unsure kemaslahatan. Karena Umar kebetulan melihat ada kemaslahatan, maka ia melakukannya. Sementara itu Rasulullah dan Abu Bakar tidak melihat ada unsur kemaslahatan, sehingga beliau berdua tidak melakukan penambahan had menjadi delapanpuluh kali cambukan.⁶⁸

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman had, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai had yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai ta'zir yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan ulil amri (imam/hakim)

Apabila terjadi beberapa kali perbuatan meminum khamr sebelum dihukum salah satunya maka hukuman tersebut saling memasuki (*tadakhul*), artinya pelaku hanya dikenai satu jenis hukuman saja. Apabila hukuman had bagi peminum khamr ini tergabung dengan hukuman mati, seperti ia meminum khamr dan berzina sedang *muhshan* maka hukuman yang dilaksanakan cukup hukuman yang paling berat saja yaitu hukuman mati. Dalam hal ini hukuman mati menyerap hukuman lain yang lebih ringan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'I, hukuman mati tidak menyerap hukuman

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 77.

⁶⁸ M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 55.

lain yang lebih ringan, sehingga dengan demikian, semua hukuman harus dilaksanakan. Apabila hukuman had bagi peminum khamr bergabung dengan hukuman lain selain hukuman mati maka hukuman-hukuman tersebut tidak saling memasuki, kecuali Imam Malik dalam hukuman had *asy-syurbu* (minum) dan hukuman had qadzaf (penuduhan zina) yang jenis hukumannya sama.⁶⁹

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Hukuman untuk pelaku minum minuman keras (khamr) tidak bisa dilaksanakan apabila : *pertama*, pelaku mencabut pengakuannya, sedangkan bukti lain tidak ada. *Kedua*, para saksi mencabut persaksiannya, sedangkan bukti lain tidak ada. *Ketiga*, para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya putusan hakim tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 78.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.¹

Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak pada data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, Polresta Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar.

¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 38.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Formal, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum dan para mahasiswa mengenai persoalan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

C. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. *Data primer* adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil dari suatu pengujian tertentu. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu dengan melakukan wawancara dan Tanya jawab dengan informan untuk memperoleh keterangan yang jelas.
2. *Data sekunder* antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²

²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (cet. Ke-2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah hakim anak di Pengadilan Negeri Makassar yang telah menangani perkara narkoba anak, tahanan anak di Lapas Kelas IA Makassar dengan kasus narkoba dan polisi di Polresta Makassar.

E. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara (*interview*), yaitu situasi peran antar pribadi bertatap (*face to face*), yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yang berarti dilakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.
2. Observasi (pengamatan), yaitu salah satu metode yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.³
3. Dokumen atau bahan pustaka, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, laporan, foto dan lain-lain. Bahan pustaka dimaksud terdiri dari bahan hukum

³Amiruddin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 72.

primer, yaitu undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba.⁴

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Adapun alat-alat yang harus disiapkan untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis, alat ini berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Kamera, alat ini berfungsi untuk memotret jika sedang dilakukan pembicaraan atau wawancara dengan informan.
4. Tape recorder, alat ini berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

⁴Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Pasikotropika* (cet. Ke-1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 30.

- a. *Identifikasi data* yaitu melakukan proses klarifikasi terhadap data yang diperoleh dalam penelitian.
- b. *Reduksi data* yaitu mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topic dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- c. *Koding data* yaitu penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara member kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- d. *Tabulasi* yaitu proses penyusunan data kedalam bentuk table.⁵
- e. *Editing data* yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 129.

H. Pengujian Keabsahan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengujian dan keabsahan data, yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian ini akan membutuhkan waktu yang panjang, dalam hal ini peneliti tinggal dilapangan untuk meneliti sampai pengumpulan data tercapai.

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik yang dilakukan yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi dan hasil diskusi tersebut bisa dijadikan pembandingan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Auditing

Peneliti akan menyediakan segala macam pencatatan yang diperlukan dan bahan-bahan penelitian yang tersedia dan merangkum semua data yang telah dilakukan melalui pengamatan, wawancara, rekaman dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Anak Menyalahgunakan Narkotika

Dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2015, pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di kota Makassar terus mengalami peningkatan. Pengadilan Negeri Makassar mencatat pada tahun 2015 kasus yang masuk adalah sebanyak 45 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 hanya sebanyak 37 kasus.

Tabel 1.1 *Jumlah kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar mengenai penyalahgunaan Narkotika oleh Anak*

Usia	Tahun					Jumlah
	2011	2012	2013	2014	2015	
1-13 Tahun	-	-	-	-	-	-
14 Tahun	1	-	-	4	3	8
15 Tahun	-	3	-	3	2	8
16 Tahun	12	2	9	8	13	44
17 Tahun	4	7	16	22	27	76
Jumlah	17	12	25	37	45	136

Tabel 2.1 *Jumlah kasus yang masuk di Polrestabes Makassar mengenai penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anak*

Usia	Tahun					Jumlah
	2011	2012	2013	2014	2015	
1-9 Tahun	-	-	-	-	-	-
10-17 Tahun	5	-	18	20	19	62
Jumlah	5	-	18	20	19	62

Pada table 1.1 di atas, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Makassar yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jenis yang paling dominan digunakan adalah jenis shabu-shabu dan penggunaanya di dominasi oleh anak yang berusia 17 tahun. Pada tahun 2015 tercatat bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba adalah 27 orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 tercatat hanya 22 orang.

Dalam hal penjatuhan sanksi, di Pengadilan Negeri Makassar mencatat bahwa anak yang di vonis penjara lebih banyak dibandingkan dengan rehabilitasi. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa, anak yang di vonis penjara selain karena sudah putus sekolah juga disebabkan karena si anak sebelumnya pernah melakukan tindak pidana lain dan dipenjara.

Saat ini, bukan lagi rahasia bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya di tanah air Indonesia telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan dan tak terkecuali di kota Makassar. Penyebaran narkotika tidak saja telah merata,

tetapi benar-benar semakin tidak pandang bulu. Sasarannya bukan hanya orang dewasa tetapi anak saat ini menjadi sasaran utama dari para bandar narkoba, selain itu peredarannya tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi telah menyusup ke pelosok-pelosok desa.

Saat ini penyalahgunaan narkoba umumnya dilakukan oleh anak usia sekolah yang terbilang sangat potensial dan produktif, yaitu anak yang berusia antara 15 sampai 17 tahun. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada penggunaan bagi diri sendiri saja tetapi juga sudah ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, anak yang merupakan generasi penerus bangsa sekaligus menjadi cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang justru melakukan suatu pelanggaran hukum dan terperangkap dalam lembah penyalahgunaan narkoba.

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan anak terseret dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Faktor keluarga

Didikan dari keluarga khususnya adalah orang tua sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku anak. Orang tua yang mendidik anak terlalu keras akan menjadikan anak ketakutan dan bahkan akan menjadi pembangkang terhadap orang tuanya sendiri. Dan juga sebaliknya, anak yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya juga akan menjadikan seorang anak leluasa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya termasuk dari menyalahgunakan narkoba.

Na sayangja mamakku. Tidak pernahji marah-marah. Mintaka uangna selalukuji na kasi. Ku bilangmi saja to, mauka beli buku. Tapi sebenarna mauka itu beli

shabu-shabu sama temanku. Pulanga di rumah, tidak pernah tonji bertanya mamakku bilang manami bukunu nak¹

Punna appalaka doe'na bapakku, tenaja na kuta'nang kana apa ero nu balli. Sanna' bajikna bapakku ka'. Jari punna eroka ammalli shabu-shabu nampa tena doekku, appala' mama' ri bapakku toh. Ka langsung jaki na sare²

Tidak adaji ka' yang mau marahika. Tidak adami bapakku, mamakku juga tidak kutaumi bilang dimanai³

Di sisi lain, seorang anak yang tidak mendapatkan didikan dari orang tua juga akan menjadikan anak mencari perhatian di tempat lain. Hal ini disebabkan karena orang tua yang sudah tidak ada lagi (meninggal) atau karena orang tuanya sudah berpisah. Anak yang berada dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Oleh karena itu, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya akan mencari perhatian itu diluar dari lingkungan keluarga yang justru membuatnya terjebak dalam pergaulan yang tidak benar.

Ditambah lagi dengan kondisi Kota Makassar saat ini yang sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat, hal tersebut ikut mendorong penyalahgunaan narkoba dalam hal ini adalah peredaran gelap narkoba semakin merajalela dan menjadikan anak sebagai sasaran utamanya. Di sisi lain, anak yang hidup diperkotaan cenderung memiliki sifat yang sombong dan memiliki pergaulan yang bebas. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong mengapa para pengedar narkoba menjadikan anak sebagai salah satu sasarannya.

¹Amran (17 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 29 Januari 2016.

² Muhammad Rasul (17 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2016.

³Herul Wirayuda (16 Tahun), Anak Yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2016.

Anak yang hidup dalam pergaulan bebas disebabkan karena orang tua yang tidak memperdulikan atau kurang memperhatikan anak. Sehingga anak kurang mendapat didikan dari orang tua, dan juga anak yang pergaulannya bebas bisa jadi merupakan bentuk protes kepada orang tua yang selama ini sibuk dengan urusannya masing-masing dan lupa akan kewajibannya sebagai orang tua.

Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab dari penyalahgunaan narkotika, juga di sebutkan oleh Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W dalam bukunya Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum yang mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di sebabkan karena beberapa faktor, yaitu: *pertama*, adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan urusannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home. *Kedua*, sarana dan prasarana: karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

2. Faktor Pergaulan/Lingkungan Sosial

Pergaulan anak dimasa sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Di masa yang seperti sekarang ini, dimana anak disuguhkan dengan berbagai macam teknologi yang canggih mulai dari handphone, gadget dan lain sebagainya membuat anak akan semakin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling terdepan. Bukan untuk menjadi yang terdepan dalam hal prestasi tetapi dalam hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikan.

Pergaulan anak dimasa sekarang, khususnya anak yang hidup diperkotaan sungguh sangat memprihatinkan. Jika diperhatikan, pergaulan anak di kota Makassar khususnya anak sekolahan cenderung mengarah ke budaya simbolik, yaitu membuat perkumpulan-perkumpulan atau lebih sering disebut dengan “geng” dimana tujuannya adalah hanya untuk mendapat pengakuan dari kelompok lainnya. Anak yang memiliki “geng” memiliki sifat solidaritas yang sangat tinggi. Mereka akan melakukan apapun untuk membela kelompoknya dan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh anggota kelompoknya yang lain, termasuk jika disuruh untuk menggunakan narkoba dengan alasan hanya coba-coba.

temanku itu suruhka. Coba-cobaji jga. Itu shabu-shabu temanku juga yang beli. Tidak ku tauki ia bilang dimanai beli. Tapi na bilang nanti kalo masi mauka bedeng telponmi saja pengedarna nanti na bawakanjaki bedeng. Tapi tidak kutaumi ia pastinya juga ka’.⁴

Tidak hanya terbatas pada penggunaan narkoba untuk dirinya sendiri, tapi yang paling memprihatinkan lagi adalah Anak sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Biasanya anak yang sudah sering menggunakan narkoba lama kelamaan akan ikut mengedarkan narkoba, disebabkan karena bujukan dari bandar narkoba tempat dimana sang Anak biasa memperoleh narkoba untuk dirinya sendiri. Hal ini juga tidak lepas dari pergaulan anak yang tidak dapat membedakan mana perkumpulan yang baik untuk dirinya dan perkumpulan yang hanya akan membawa dampak yang negatif.

⁴Muhammad Rasul (17 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2016.

Untuk anak yang berasal dari keluarga yang mampu biasanya akan berkumpul di tempat-tempat yang bagus seperti café dan bar. Sementara anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu biasanya hanya akan berkumpul di sudut-sudut gang rumah. Pada saat berkumpul seperti inilah, anak akan ditawarkan untuk menggunakan narkoba.

Ada itu ka' mirip pos ronda tapi bukanji jga ia pos ronda. Kalo malammi pergima disitu sama temanku. Menyanyi-menyanyi. Kalo ada yang dapat seng begituan. Na bawami itu. Baru sama-samaki pakeki. Tengah malampi biasa ka'. Itu yang kutemani tidak adami yang sekolah. Biasa juga tidak mau pulang dirumana ka seringi bededipukuli⁵

Pertamana coba-cobaji. Tapi lebi kusuka kalo pakea. Kalo tidak pakea ini kepalaku saki' sekali kaya' mau pecah. Kalo begitumi, biasana ku ikat mami ini kepalaku pake sarung. Maumi di apa ka'. Mauki pake tapi tida ada uang. Itumi juga ka' dulu sebelumku ditangkap, biasa itu bandarka na suruka pigi antar sabu-sabu. Nanti dapaka seng coppe'na. biasana juga ada temangku mau, jari saya na suruh pigi di bandarka beli.⁶

Adanya perkumpulan-perkumpulan yang ikut menjadi faktor penyebab anak menyalahgunakan narkoba juga disebutkan oleh Wahidah Abdullah dalam bukunya *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* yaitu terdapat berbagai kondisi sosial yang dapat menyeret anak ke lembah kebinasaan karena penyalahgunaan narkoba, diantaranya ialah adanya geng-geng, komplotan-komplotan baik itu di kampung-kampung, di pasar-

⁵Amran (17 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 29 Januari 2016.

⁶Herul Wirayuda (16 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2016.

pasar bahkan dikalangan pelajar sekolah. Bermula dari kebiasaan bergerombol dimulut-mulut gang, di sudut-sudut jalan, dipangkalan-pangkalan becak/taksi dan sebagainya. Mereka melakukan kegiatan yang tidak produktif dan tidak bermanfaat seperti merokok, mengganggu orang yang lewat, minum minuman keras, lama kelamaan mereka melakukan judi, mencopet, mencuri, menodong bahkan iseng-iseng mereka berlanjut pada perbuatan pelecehan seks atau pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba di kota Makassar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Banyaknya pengangguran dan anak yang putus sekolah ditambah lagi dengan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan bisnis narkoba sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh materi. Peredaran gelap narkoba di kota Makassar saat ini tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa tetapi anak sudah terlibat dalam peredaran narkoba.

Ka tidak ada uangku. Siapa mau kasika uang? Tidak banyakji ia yang ku dapat itu dari menjualka shabu-shabu. Tapi biar sedikit yang penting ada seng uangku toh dikantong.⁷

Anak yang terlibat dalam peredaran narkoba biasanya adalah anak yang putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan. Selain memperoleh uang dari mengedarkan narkoba, anak juga dapat menggunakan narkoba kapanpun dia mau.

⁷Herul Wirayuda (17 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2016.

4. Faktor Hukum

Undang-Undang mengenai narkoba sudah sangat jelas mengatur mengenai sanksi bagi siapapun yang menyalahgunakan narkoba dan jenis obat-obatan berbahaya lainnya. Hanya saja dalam menerapkan hukum yang sudah ada masih saja ada segelintir orang yang tidak menerapkan hukum tersebut sebagaimana mestinya.

Ketidaktahuan anak mengenai narkoba, Undang-Undang yang berkaitan dengan narkoba serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ikut menjadi pendorong mengapa dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Makassar terus mengalami peningkatan. Di tambah lagi, aparat pemerintah dan para penegak hukum di anggap lamban dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.

Selain dari kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi di anggap tidak terlalu serius dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan tidak jarang, penegak hukum yang diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan narkoba justru ikut dalam penyalahgunaan narkoba, baik menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri ataupun ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Edd jangammi bicara hukum ka'. Percumanaji ada hukum tapi kalo na tangkapki polisi bisa tonjaki bebas kalo dikasi'mi uang.⁸

Tidak kutauki kalo ada Undang-Undang narkoba. Pokokna dipikiranku pake'ma saja, tenang pikiran.⁹

⁸Herul Wirayuda (16 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 27 Januari 2016.

Ketidaktahuan generasi muda pada narkoba serta gejala kepribadian dan ketersediaan narkoba merupakan pokok permasalahan dalam memerangi narkoba. Oleh karenanya variable pasokan dengan permintaan harus ditangani sekaligus. Keselamatan generasi muda dari ancaman narkoba ada ditangan mereka sendiri, bukan polisi, orang tua atau guru. Nasution berpendapat bahwa kesibukan orang tua dan kesulitan dalam pelajaran merupakan faktor sekunder yang turut menentukan seseorang terjerumus dalam narkoba.

B. Dampak-dampak Yang Ditimbulkan dari Penyalahgunaan Narkotika

Setiap zat atau obat yang dimasukkan ke tubuh organisme hidup dapat memberikan pengaruh pada satu atau lebih fungsi organnya. Begitu pula dengan jenis obat-obatan atau zat terlarang. Berbagai macam narkoba dapat menimbulkan efek khusus bila dipakai oleh manusia, baik dalam fungsi pemikiran, perasaan dan perilaku.¹⁰

Narkoba berbeda dengan obat-obatan yang biasa kita jumpai di apotek. Kandungan zat kimia yang ada pada narkoba sangat berbahaya bagi pemakainya. Biasanya orang yang telah mengkonsumsi narkoba sulit sekali untuk meninggalkannya, karena akan terlalu terkenang untuk memakainya lagi. Olehnya itu sangat perlu untuk mengetahui dampak dan bahaya yang akan ditimbulkan oleh narkoba.¹¹

⁹Amran (17 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkotika, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 29 Januari 2016.

¹⁰Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 134.

¹¹Mashuri Sudiro, "Islam Melawan Narkoba," dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 135.

Narkoba sebenarnya zat yang sangat bermanfaat bagi manusia jika digunakan untuk keperluan tertentu, dengan alasan dan cara yang benar serta tidak melebihi batas kewajaran. Tetapi zat ini akan menjadi benda yang berbahaya dan akan menimbulkan malapetaka bagi manusia jika digunakan untuk keperluan yang tidak wajar dan dilakukan dengan cara yang tidak benar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Narkoba mempunyai tiga sifat yang sangat berbahaya bagi penggunaanya, yaitu:¹²

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika, banyak corak ragamnya. Suatu hal yang merisaukan adalah anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa dan Negara umumnya dan khususnya harapan kedua orang tua. Orang tua saat ini perlu memerhatikan perubahan perilaku anaknya, karena dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Perubahan perilaku yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:¹³

Tabel 3.1 *Perbandingan dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah memakai Narkotika*

NO	Sebelum Memakai Narkotika	Sesudah Memakai Narkotika
1.	Riang	Menjadi Pendiam, Suka memendam Rasa
2.	Sehat	Menjadi Sakit-sakitan
3.	Bertenaga	Menjadi Loyo
4.	Percaya Diri	Menjadi Peragu

¹²Winarto, "Ada Apa dengan Narkoba," dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 164.

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, h. 123.

5.	Sabar	Menjadi Mudah Putus Asa
6.	Besemangat	Menjadi Lemah Semangat
7.	Rajin Sekolah	Menjadi Suka Membolos
8.	Ada Perhatian Kepada Orang Lain	Menjadi acuh tak acuh, egois
9.	Hemat	Menjadi boros, sering minta uang dan kadang mencuri.

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba dapat bermacam-macam. Terkadang bagi pecandu itu sendiri, mereka tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Dengan demikian mereka tidak dapat mengetahui bahwa akibat dari pemakain tersebut akan banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan, tidak hanya organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru mereka yang terserang bahkan virus pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka.¹⁴

Ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika oleh anak, yaitu :

1) Dampak secara langsung

Narkotika biasanya digunakan oleh orang dewasa dengan alasan banyak pikiran dan beban hidup yang dirasa sulit untuk bisa diatasi sehingga melarikan diri ke narkotika yang dapat menenangkan pikirannya. Akan tetapi, saat ini narkotika tidak

¹⁴ Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba* (Bandung: Shakti Adiluhung, 2008), h. 19.

hanya digunakan oleh orang-orang dewasa namun sudah menyerang diri seorang anak. Anak yang menyalahgunakan narkoba cenderung dipengaruhi oleh pergaulan dan teman dekatnya.

Sama halnya dengan orang dewasa, anak yang menyalahgunakan narkoba juga akan merasakan hal sama, seperti:

- a) Perasaan terasa tenang
- b) Tidak merasakan lapar
- c) Beban pikiran menghilang

Enak dirasa ka', tenang pikiran, tidak dirasa juga ka' kalo laparki. Saya kalo sudahka pakai. Biasa pergika pelki rumahku ka tidak capekji orang.¹⁵

Ituji saya ka' kurasa. Tenangi pikiranku baru tidak laparka juga.¹⁶

Selain dari dampak yang dirasakan secara langsung oleh fisik, penyalahgunaan narkoba juga membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan seorang anak, seperti:

- a) Bagi keluarga, anak yang menyalahgunakan narkoba membuat keluarga khususnya orang tua menjadi malu. Perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak menghilang bahkan orang tua yang tidak sanggup menanggung malu mengusir anak dari rumah.
- b) Bagi lingkungan sosial, anak yang menyalahgunakan narkoba dikucilkan dari lingkungan tempat tinggalnya, dihina bahkan tidak dianggap sama sekali. Selain

¹⁵Muhammad Rasul (17 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 26 Januari 2016.

¹⁶Herul Wirayuda (16 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkoba, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 26 Januari 2016.

itu, anak yang menyalahgunakan narkotika juga dikeluarkan dari sekolahnya dan dijaui oleh teman-temannya. Dan pada akhirnya anak yang menyalahgunakan narkotika hidup dalam keterasingan tanpa ada yang memperdulikannya.

- c) Dimasukkan kedalam penjara, anak yang terbukti menggunakan narkotika sudah pasti akan menghabiskan sebagian waktunya di dalam penjara. Meskipun sanksi penjara yang dijatuhkan bagi anak yang menyalahgunakan narkotika terbilang singkat tentu hal tersebut masih membawa dampak bagi jiwa si anak seperti stress dan tertekan. Di tambah lagi dengan penjara yang digabung dengan orang dewasa. Penggabungan tahanan antara anak dengan orang dewasa tentu akan berdampak tidak baik bagi mental si anak.

Enam bulanma di penjara. Tidak ada biarr satu tetanggaku datang jenguka. Malu-malui mungkin. Tidak ada juga temanku datang ka dikeluarkanma dari sekolah.¹⁷

Narkotika tidak hanya merampas kasih sayang seorang anak dari orang tua dan teman-temannya, akan tetapi narkotika juga merampas masa depan seorang anak. Jika anak sudah kehilangan masa depannya maka bangsa juga akan kehilangan penerusnya, sehingga secara tidak disadari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak juga membawa dampak bagi bangsa dan Negara.

¹⁷Muhammad Rasul (17 Tahun), Anak yang Menyalahgunakan Narkotika, *Wawancara*, Lapas Kelas I Makassar, 26 Januari 2016.

2) Dampak secara tidak langsung

Dengan menggunakan narkoba memang akan membuat para pemakainya merasakan sesuatu yang berbeda seperti perasaan tenang dan pikiran yang tadinya kacau menjadi terlupakan. Tapi tanpa mereka sadari, ada dampak yang luar biasa yang menanti mereka dimasa depan, seperti:

- a) Gangguan pada sistem saraf, jantung, pembuluh darah, paru-paru, bahkan HIV jika dalam menggunakan narkoba memakai jarum suntik secara bergantian.
- b) Sulit mendapatkan pekerjaan. Anak yang menyalahgunakan narkoba yang kemudian diberikan sanksi dengan di penjara akan sulit dalam melanjutkan hidupnya. Selain sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya sekolah yang mau menerima mantan narapidana apalagi menyalahgunakan narkoba, si anak juga akan sulit mendapat pekerjaan. Pendidikan tidak jelas, ditambah lagi dengan mantan narapidana tentu akan sangat menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan.

C. Peran Penegak Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-penggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara berama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak Negara di dunia, khususnya di Negara Indonesia.

Bagi Indonesia, akibat posisi geografis dan perkembangan hasil-hasil pembangunan yang meningkat, maka kewaspadaan terhadap ancaman ini perlu secara dini diantisipasi. Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkoba harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama.¹⁸

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:

1. Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi factor-faktor penyebab yang disebut sebagai factor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.
2. Preventif, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan:
 - a) Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan
 - b) Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan
 - c) Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia

¹⁸Maidin Giultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, h. 127.

- d) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri di samping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional
- 3. Represif, artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba
- 4. Treatment dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

Mengenai Peranan penegak hukum, jika dilihat dalam arti fungsi dan maknanya peranan penegak hukum merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.¹⁹ Adapun fungsi dari sistem hukum, yakni: *pertama*, fungsi kontrol sosial (*social control*). *Kedua*, berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settle-ment*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan local berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik. *Ketiga*, fungsi retribusi atau fungsi rekaya social (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang

¹⁹Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 69.

berencana yang ditentukan oleh pemerintah. *Keempat*, fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.²⁰

Adapun upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kota Makassar yaitu :

a. Usaha Preventif

Usaha preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin merajalela.²¹ Adapun tindakan preventif yang dilakukan yaitu:

1) Sosialisasi/penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba

Dalam hal sosialisasi, aparat kepolisian bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan dan lain-lain melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung. Penyuluhan biasanya dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan.

Bentuk penyuluhan yang dilakukan bisa dalam bentuk seminar, ceramah dan lain-lain. Dalam seminar, para peserta diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemberi materi yang biasanya adalah tenaga professional seperti ahli hukum,

²⁰Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, h. 70.

²¹Adrianus, Polisi, Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 04 Maret 2016.

psikolog, polisi dan dokter. Dengan adanya dialog dan Tanya jawab secara langsung diiharapkan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat sehingga para aparat dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasinya khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika.

Dalam bentuk pencegahan ini, kami dari aparat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung mengenai bahaya dari narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya, dalam melakukan sosialisasi kami biasanya bekerjasama dengan instansi ataupun ormas.²²

2) Kampanye anti narkoba

Kampanye mengenai bahaya narkoba sudah dilakukan sejak lama. Kampanye dilakukan melalui poster, spanduk, baliho dan brosur. Dengan itu, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika.

Kampanye anti narkoba berbeda dengan penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba, dalam penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba masyarakat memperoleh kesempatan secara langsung berdialog ataupun Tanya jawab mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika sementara dalam hal kampanye anti narkoba hanya memberikan informasi secara tertulis melalui spanduk ataupun poster yang di pasang di pusat-pusat keramaian, jalan raya tempat-tempat umum liannya. Oleh karena itu, kampanye anti narkoba dianggap kurang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

²²Adrianus, Polisi, Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 04 Maret 2016.

3) Operasi Antik (Anti Narkotika)

Tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Untuk menekan penyalahgunaan narkotika semakin merajalela di kota Makassar, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan rutin melakukan kegiatan yang disebut dengan Operasi Antik (Anti Narkotika). Operasi ini dilakukan di jalan-jalan raya dengan memeriksa para pengguna jalan dan tempat hiburan malam, selain itu operasi antik juga dilakukan di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat yang paling sering digunakan untuk transaksi narkotika.

Selalu melakukan razia. Biasa disebut dengan operasi antik (anti narkotika), kemarin, kami dari aparat kepolisian setiap dua minggu turun dilapangan untuk melakukan razia. Dalam razia itu, yang kedapatan membawa narkoba akan kami proses lebih lanjut.²³

b. Represif (penindakan)

Usaha represif dilakukan dengan memberikan tindakan tegas kepada orang yang terlibat langsung dalam penyalahgunaan narkotika. Usaha represif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, baik pengedar maupun pengguna.

Dalam hal penindakan, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian biasanya bekerjasama dengan masyarakat. Dimana aparat kepolisian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberitahukan kepada aparat jika mengetahui informasi mengenai penyalahgunaan narkotika dan tidak boleh main hakim sendiri.

²³Adrianus, Polisi, Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 04 Maret 2016.

Kami dari aparat tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat juga harus terlibat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini, untuk melakukan penggerebekan ke tempat-tempat yang diduga menjadi sarang dari pengedar maupun pengguna narkoba, informasi awalnya berasal dari masyarakat dan kami dari aparat sangat berharap masyarakat dapat memberikan informasi dengan cepat jika mengetahui ada penyalahgunaan narkoba.²⁴

Banyak tindak pidana yang saat ini pemberantasannya melibatkan masyarakat banyak, karena sangat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dalam hal ini wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui narkoba yang disalahgunakan.

²⁴Adrianus, Polisi, Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 04 Maret 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkotika pada umumnya dilakukan oleh anak yang berusia antara 14 sampai 17 tahun yang sangat potensial dan produktif. Hal ini disebabkan oleh berbagai pengaruh yang sangat kompleks. Ada beberapa faktor yang memicu penyalahgunaan narkotika oleh anak, yaitu:

a. Faktor keluarga

Didikan dari keluarga khususnya adalah orang tua sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku anak. Orang tua yang mendidik anak terlalu keras akan menjadikan anak ketakutan dan bahkan akan menjadi pembangkang terhadap orang tuanya sendiri. Dan juga sebaliknya, anak yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya juga akan menjadikan seorang anak leluasa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya termasuk dari menyalahgunakan narkotika.

b. Faktor sosial/lingkungan

Pergaulan anak dimasa sekarang, khususnya anak yang hidup diperkotaan sungguh sangat memprihatinkan. Jika diperhatikan, pergaulan anak di kota Makassar khususnya anak sekolahan cenderung mengarah ke budaya simbolik, yaitu membuat perkumpulan-perkumpulan atau lebih sering disebut dengan “geng” dimana tujuannya adalah hanya untuk mendapat pengakuan dari kelompok lainnya. Anak yang memiliki “geng” memiliki sifat solidaritas yang sangat tinggi. Dimana mereka

akan melakukan apapun untuk membela kelompoknya dan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh anggota kelompoknya yang lain, termasuk jika disuruh untuk menggunakan narkoba dengan alasan hanya coba-coba.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba di kota Makassar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Banyaknya pengangguran dan anak yang putus sekolah ditambah lagi dengan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan bisnis narkoba sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh materi.

d. Faktor Hukum

Selain dari kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi di anggap tidak terlalu serius dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan tidak jarang, penegak hukum yang diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan narkoba justru ikut dalam penyalahgunaan narkoba, baik menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri ataupun ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

2. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yaitu:

a. Dampak secara langsung

- 1) Dampak untuk fisik : Perasaan terasa tenang, tidak merasakan lapar, dan beban pikiran menghilang.
- 2) Dampak dalam kehidupan : kehilangan kasih sayang dari keluarga khususnya orang tua, dikucilkan dari lingkungan tempat tinggal, dijauhi teman dan dikeluarkan dari sekolah serta dimasukkan kedalam penjara.

- b. Dampak secara tidak langsung
 - 1) Akan mengalami gangguan pada organ tubuh, bahkan terserang HIV jika menggunakan alat suntik secara bergantian.
 - 2) Sulit mendapatkan pekerjaan.
- 3. Upaya penegak hukum dalam melakukan berbagai tindakan guna mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara :
 - a. Usaha Preventif, yaitu usaha yang dilakukan untuk menekan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin merajalela.
 - 1) Melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba
 - 2) Melakukan kampanye anti narkoba
 - 3) Melakukan operasi antik (anti narkoba) secara rutin.
 - b. Represif (penindakan), yaitu dengan memberikan tindakan tegas kepada anak yang tertangkap basah menyalahgunakan narkoba.

B. Implikasi Penelitian

1. Faktor ekonomi dan faktor hukum menjadi salah satu penyebab mengapa seorang anak menyalahgunakan narkoba. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi alasan bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk memperhatikan keadaan rakyat kecil khususnya anak yang hidup diperkotaan yang sangat membutuhkan perhatian. Banyak anak yang seharusnya melewati masa anak-anaknya di sekolah dengan menuntut ilmu justru menghabiskan waktunya dijalanan dan sebagian lagi dengan menjadi pengedar narkoba. Anak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba didominasi oleh

anak yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan lagi sistem pendidikan yang saat ini berjalan di kota Makassar dengan memberikan perhatian khusus bagi anak yang tidak mampu dalam hal materi. Selain itu, untuk mengatasi anak yang memang tidak memiliki keinginan untuk memperoleh ilmu di dunia pendidikan juga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah, sudah seharusnya pemerintah menyediakan wadah ataupun tempat bagi anak tersebut untuk menyalurkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.

2. Dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar tidak semakin merajalela di kota Makassar, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian sudah melakukan upaya yang sangat optimal seperti dengan rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung mengenai seluk beluk dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dengan rutin pihak kepolisian juga melakukan razia di jalan-jalan, tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Hal tersebut dirasa belum efektif dalam menekan jumlah anak yang menyalahgunakan narkoba di kota Makassar. Terbukti bahwa dari tahun ke tahun jumlah anak yang menyalahgunakan narkoba terus mengalami peningkatan. Melihat hal tersebut, dengan hanya melakukan razia, sosialisasi maupun penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba tidaklah cukup. Aparat harus tegas dalam memberikan sanksi bagi anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba agar dapat tercipta efek jera. Selain itu, untuk menekan jumlah agar penyalahgunaan narkoba tidak terus mengalami peningkatan, dalam hal penjatuhan pidana juga harus diperhatikan. Anak yang terbukti

menyalahgunakan narkoba sebaiknya diberikan sanksi dengan menjalani rehabilitasi bukan diberikan sanksi dengan hukuman penjara. Rehabilitasi akan dengan cepat membantu anak terlepas dari cengkeraman narkoba, berbeda dengan hukuman penjara yang diberikan justru akan membuat anak semakin sulit untuk melepaskan diri dari belenggu narkoba. Apalagi dalam hal pemidanaan, anak yang menyalahgunakan narkoba tidak ditempatkan di tahanan khusus anak melainkan digabung dengan tahanan dewasa. Hal ini tentu berakibat tidak baik bagi mental si anak. Melihat hal tersebut, sudah sepatutnya hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang menyalahgunakan narkoba juga harus mempertimbangkan lagi dampak yang dapat timbulkan khususnya bagi diri anak. Hal utama yang dibutuhkan anak untuk membebaskan diri dari belenggu narkoba adalah dengan rehabilitasi bukan dipenjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu An-Nuur, Al-Ahmady. "Narkoba," dalam Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*. cet. Ke-2; Jakarta: 1998
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Dharma Art, 2015.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Purwanto, Chandra. "Mengenal dan Mencegah Bahaya Narkotik," dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2009.
- Rifai, Achmad. *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*. Aswaja.
- Majid, Abdul. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika," dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2009.
- M Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mulyadi, Lilik. "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan parktik penerapannya dalam putusan pengadilan)", *Laporan Penelitian* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh.Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sambas, Nandong. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sanita, Santi. *Bahaya Nafza Narkoba*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, “Bahaya Narkotika Mengancam Umat,” dalam Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mashuri Sudiro, “Islam Melawan Narkoba,” dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2009)
- UIN Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Pers, 2013.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Warsidi, Edi. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Winarto. “Ada Apa Dengan Narkoba,” dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2009.
- Republik Indonesia. “Undang-undang Narkotika (UU RI No.22 Tahun 1997) dan Psikotropika (UU RI No. 5 Tahun 1997)”
- Republik Indonesia. “Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Republik Indonesia. “Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”
- Republik Indonesia. “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”
- Republik Indonesia. “Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anisa, lahir di Kokowa kec. Bontonompo kab.Gowa pada tanggal 11 Oktober 1994 merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Yatim DG.Rani dan Ibu Suryati DG.Rimang. penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri kokowa pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Muhammadiyah Takwa dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikannya di MA.Muhammadiyah Limbung dan lulus pada tahun 2012. Pada bulan September tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikannya dan di terima di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Alauddin Makassar dan mulai tahun 2012 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Universitas Islam Negeri Uin Alauddin Makassar. Pada tanggal 2 Agustus sampai 2 Oktober 2015, penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP) di Pengadilan Negeri Makassar.